

ALTERNATIF KELEMBAGAAN KEMITRAAN BAGI PEMBERDAYAAN NELAYAN PERIKANAN TANGKAP DI KOTA AMBON

ALTERNATIVE PARTNERSHIP INSTITUTIONS FOR FISHERMEN EMPOWERMENT IN AMBON

Yoisy Lopolalan^{1*}

¹Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura

*Penulis korespondensi: ojuslopu21@gmail.com

Diterima 13 Juni 2022, disetujui 15 Juni 2023

ABSTRAK

Ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh perairan sekitar Pulau Ambon, belum didukung sepenuhnya oleh kemampuan sumberdaya manusia yang dapat mengelolanya dengan baik. Penguasaan teknologi dan manajemen di bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di Kota Ambon masih terbatas untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tersedia. Dilain sisi ketersediaan modal untuk menggairahkan kegiatan ekonomi dibidang perikanan dan kelautan juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat yang mendiami pesisir Kota Ambon masih bersifat tradisional dan bersifat *subsisten* sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Dari gambaran kondisi di wilayah Kota Ambon tersebut, maka kehadiran kemitraan yang diprakarsai oleh pemerintah ataupun swasta merupakan hal yang urgen dalam kerangka memberdayakan masyarakat nelayan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka alternatif kelembagaan kemitraan yang tepat bagi pemberdayaan nelayan perikanan tangkap di Kota Ambon. Metode penelitian menggunakan metode *case study*, pengambilan data menggunakan metode *focus group discussion* (FGD). Analisis Data menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Keluaran penelitian ini berupa kerangka alternatif kelembagaan kemitraan perikanan tangkap dimana dalam membangun konsep kemitraan yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat perlu dipelajari lebih awal tentang potensi masyarakat itu sendiri, baik *human capital*, *natural capital*, dan *social capital*, yang dibarengi oleh pemahaman yang tepat tentang masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga kemitraan yang terbangun adalah tepat sasaran, yang pada gilirannya dapat memberikan hasil yang memadai.

Kata kunci: kelembagaan, kemitraan, pemberdayaan, perikanan tangkap.

ABSTRACT

The availability of potential fishery resources owned by the waters around Ambon Island has not been fully supported by the ability of human resources to manage them properly. The mastery of technology and management in the field of fisheries and marine owned by coastal communities in Ambon is still limited to be able to utilize the potential of fisheries and marine resources available. On the other hand, the availability of capital to stimulate economic activities in the fisheries and marine sector has also not been fully met. The mastery of knowledge and business skills of the people living on the coast of Ambon is still traditional and subsistence in nature, so efforts are still needed to increase the productivity of businesses owned by the community. From the description of the conditions in the Ambon area, the presence of partnerships initiated by the government or the private sector is urgent in the framework of empowering fishing communities in this region. This study aims to formulate an alternative framework of partnership institutions that are appropriate for the empowerment of capture fishermen in Ambon. The research method used case study method, data collection using focus group discussion method. Data analysis uses a qualitative descriptive approach. The output of this research is an alternative framework of capture fisheries partnership institutions where in building a partnership concept that can accommodate the aspirations of the community, it is necessary to study the potential of the community itself, both human capital, natural capital, and social capital, coupled with a proper understanding of the problems faced by the fishing community itself, so that the partnership that is built is right on target, which in turn can provide adequate results.

Keywords: institutionalization, partnership, empowerment, capture fisheries.



Cara sitasi: Lopulalan, Y. 2023. Alternatif Kelembagaan Kemitraan Bagi Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tangkap di Kota Ambon. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1), 77-86, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.77/>

PENDAHULUAN

Faktor penyebab lambatnya pengembangan usaha penangkapan oleh nelayan tradisional saat ini adalah *bergaining position* yang masih lemah, *kurangnya modal usaha, tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan yang rendah dan kurangnya pembinaan dari instansi terkait*. Sangat dipahami perikanan skala kecil atau tradisional umumnya berada di luar kekuasaan politik maupun ekonomi, sehingga nelayan kelompok ini sering memiliki posisi tawar yang lemah. Dampak dari kondisi ini adalah mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha penangkapan. Kalau ada pihak perbankan akan menyalurkan kreditnya pada usaha penangkapan skala kecil ini, maka ada persyaratan anggunan (*colleteral*) dan penerapan suku bunga yang tinggi, yang hal ini justru menjadi titik lemah bagi nelayan skala kecil. Sementara pada sisi lain prosedur perbankan terlalu rumit dan berbelit-belit.

Ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh perairan sekitar Pulau Ambon, belum didukung sepenuhnya oleh kemampuan sumberdaya manusia yang cukup dan dapat mengelolanya dengan baik. Penguasaan teknologi dan manajemen di bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di Kota Ambon masih belum cukup untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tersedia (DKP, 2008b). Di lain sisi ketersediaan modal untuk menggairahkan kegiatan ekonomi dibidang perikanan dan kelautan juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan usaha masyarakat yang mendiami pesisir Kota Ambon masih bersifat tradisional dan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Berbagai upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala ini, antara lain dengan penyediaan fasilitas kredit oleh

pemerintah daerah melalui lembaga perbankan. Namun akses nelayan kecil untuk memperoleh bantuan modal sangat terbatas, diikuti pula oleh berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi oleh nelayan seperti tingkat suku bunga yang tinggi. Kehadiran program PEMP melalui kemitraan yang dibangun oleh dinas kelautan dan perikanan adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan nelayan di kota ini (DKP, 2008a).

Berkaitan dengan kehadiran program PEMP melalui kemitraan usaha yang dibangun, adalah merupakan hal yang mesti menjadi pemahaman awal dari setiap komponen yang terlibat adalah konsep kemitraan. Hal ini menjadi *urgen* untuk dipahami oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dalam program ini, agar dalam implementasinya dapat dilaksanakan secara tepat.

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka alternatif kelembagaan kemitraan yang tepat guna dalam pemberdayaan nelayan perikanan tangkap di Kota Ambon. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dinas kelautan dan perikanan Kota Ambon dan instansi terkait dalam merumuskan konsep dan strategi kemitraan yang mampu mendorong upaya pemberdayaan nelayan khususnya nelayan perikanan tangkap.

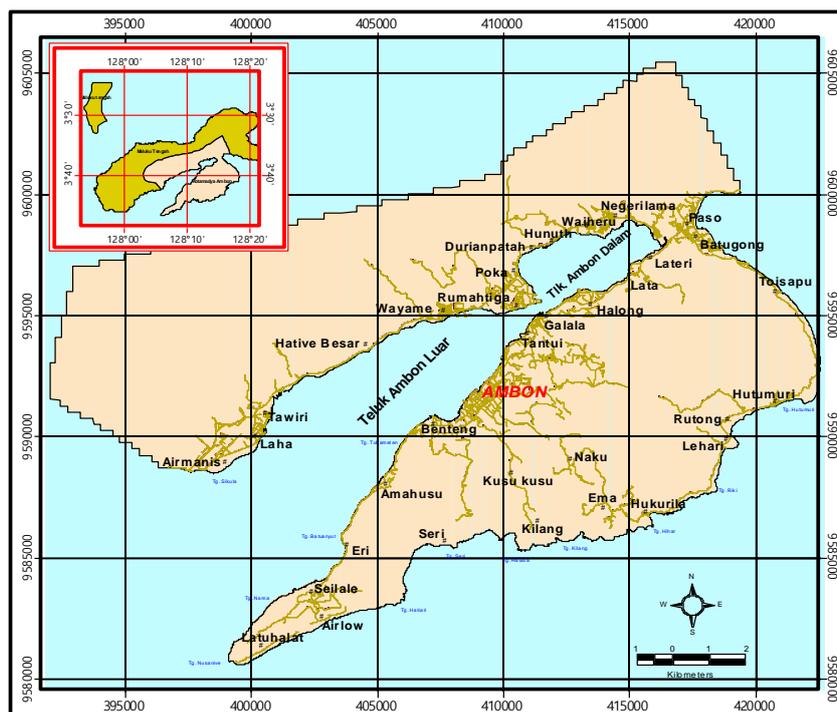
METODOLOGI

Penelitian ini berlangsung selama 8 bulan mulai bulan Juni 2021 sampai Januari 2022. Lokasi penelitian bertempat di wilayah Kota Ambon. Peta Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil di lapangan berdasarkan wawancara atau observasi bagi peserta kemitraan serta *stakeholders* lainnya yang sesuai dengan sasaran penelitian ini. Data primer yang dikumpulkan meliputi informasi yang berkaitan dengan latar belakang penyelenggaraan kemitraan, mekanisme pelaksanaan kemitraan, respon pihak-pihak terkait terhadap kemitraan dan dampak kemitraan terhadap pendapatan nelayan peserta



kemitraan. Sumber data primer tersebut adalah kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) peserta kemitraan, lembaga ekonomi pengembangan pesisir – mikro mitra mina (LEPP-M3), lembaga yang terkait dengan kemitraan, (Dinas Kelautan dan Perikanan, lembaga keuangan, LSM, Perguruan Tinggi, Perusahaan Terbatas), konsultan manajemen kota (KMK), tenaga pendamping desa (TPD), tokoh masyarakat (kepada desa, tokoh agama). Data sekunder yang dikumpulkan meliputi

hasil-hasil studi dari pihak lain, laporan tahunan dinas kelautan dan perikanan kota Ambon, laporan evaluasi program PEMP Kota Ambon, pedoman umum PEMP, statistik perikanan dan sosial ekonomi mengenai informasi wilayah dan karakteristik yang berkaitan dengan sektor perikanan. Sumber data sekunder tersebut dari berbagai instansi yaitu, dinas kelautan dan perikanan Kota Ambon, BPS Kota Ambon, kantor kecamatan, kantor desa dan lembaga/instansi terkait dengan penelitian.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni metode pengambilan responden secara sengaja. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat pemanfaat (KMP). Berdasarkan jumlah kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) yang terbentuk di Kota Ambon yang bergerak di bidang perikanan tangkap (khususnya *purse seine*) berjumlah 16 kelompok dengan jumlah populasi sebanyak 362 nelayan (BPS, 2008). Sehingga responden diambil secara proposional yang berjumlah 102 responden. Sedangkan responden untuk lembaga ekonomi pengembangan pesisir – mikro mitra mina (LEPP-M3) berjumlah 10 responden yang adalah pengurus dari LEPP-M3 tersebut. Responden dari lembaga terkait

lainnya berjumlah 10 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi. Selain itu dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Untuk menjawab tujuan penelitian, maka analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenyataan di lapangan menunjukkan pemerintah selama ini belum sepenuh hati menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan dengan baik dan benar. Hal ini terbukti dari tidak berperannya pemerintah baik dari tingkat kota, kecamatan maupun desa dalam program kemitraan yang terbangun melalui program PEMP di Kota Ambon. Sementara pihak LEPP-M3 mengharapkan



adanya perhatian pemerintah desa (mitra desa) dalam aspek pembinaan terhadap masyarakat desanya yang tentunya bertujuan terhadap keberlanjutan kemitraan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini maka sebenarnya kemitraan yang terbangun melalui program PEMP di Kota Ambon sesungguhnya masih menghadapi berbagai macam persoalan. Bila didekati dari kaidah sebab akibat, maka persoalan-persoalan yang melingkupi program kemitraan usaha pada dasarnya bersumber dari dua komponen utama, yakni struktur sumberdaya partisipan serta proses pelaksanaannya (Anwar, 1992). Dari segi kesiapan sumberdaya, maka seharusnya diantara nelayan peserta dan LEPP-M3 Kota Ambon ada “keseimbangan”. Artinya, apabila

satu pihak mengorbankan suatu sumberdaya, pihak lainnya harus mampu mengelolanya dengan baik berkat dukungan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan suasana saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan. Namun kenyataan yang terjadi dalam kemitraan yang terbangun melalui program PEMP di Kota Ambon terjadi ketimpangan. Beberapa jenis sumberdaya baik secara kuantitas maupun kualitas belum mampu menopang keberlanjutan kemitraan. Kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh nelayan perikanan tangkap khususnya kelompok masyarakat pemanfaat (nelayan *purse seine*) di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Persoalan Sumberdaya KMP Peserta Kemitraan

No.	Potensi Sumberdaya	Persoalan pada Nelayan <i>Purse Seine</i>
1.	Manusia	Pendidikan sangat rendah ada yang tidak memiliki latar belakang sebagai nelayan.
2.	Teknologi / peralatan	Belum tersedianya rumpon secara menyeluruh dan alat penangkapan yang digunakan belum memadai.
3.	Finansial	Belum dapat disediakan secara mandiri oleh kelompok dan dana untuk pengadaan peralatan penangkapan tidak tersedia.
4.	Informasi	Kurang transparan karena hanya dikuasai oleh ketua kelompok.
5.	Kelembagaan	Wadah komunikasi antar partisipan tidak ada dan ikatan kelompok nelayan relatif lemah.
6.	perikanan	Jenis ikan campuran, yang terkadang tidak dibutuhkan oleh industri perikanan.

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Berdasarkan gambaran pada Tabel 47, maka kondisi sumberdaya yang dimiliki nelayan *purse seine* tersebut belum mendukung terciptanya suasana yang saling menguntungkan. Walaupun pada awalnya, pihak LEPP-M3 dan pihak KMP saling membutuhkan, tetapi karena daya dukung sumberdaya nelayan tidak memadai, akhirnya menimbulkan kerugian bagi LEPP-M3. Kelemahan yang melekat pada sumberdaya KMP peserta kemitraan, ternyata diperparah juga dengan proses pelaksanaan kemitraan yang belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi (Tabel 2).

Berdasarkan gambaran pada Tabel 2, secara umum pelaksanaan kemitraan belum

sepenuhnya mengarah pada upaya pemberdayaan nelayan. Hal ini terlihat dari konsepsi kemitraan yang bersifat *top down* dan upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan mendasar pada sumberdaya nelayan tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, serta sistem kelembagaan belum tertata dengan baik, sehingga kurang berfungsi. Pada sisi lain masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya selaku pelaku ekonomi yang berdaulat karena tidak didukung oleh kemampuan manajerial dan ketersediaan informasi yang dapat membantu mereka melaksanakan fungsinya sebagai unit usaha yang mandiri dan otonom (Kusnadi, 2002).



Tabel 2. Identifikasi Persoalan Pelaksanaan Kemitraan

No.	Pelaksanaan Kemitraan	Persoalan
1.	Kelompok Nelayan Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuk oleh KMK dominasi ketua kelompok terlalu kuat.
2.	Pembentukan Kemitraan Usaha Aturan Main	<ul style="list-style-type: none"> • Diprakarsai oleh DKP, nelayan dimobilisasi untuk ikut kemitraan; • Tertulis tapi tidak dimiliki oleh anggota kelompok, hanya ada pada ketua kelompok, persepsi diantara nelayan peserta berbeda dan aspirasi nelayan belum terakomodasi.
3.	Organisasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada struktur yang disepakati bersama, hanya diperankan oleh ketua kelompok, pembinaan tidak terwadahkan secara baik.
4.	Sosialisasi Program	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih bersifat penerangan dan dilakukan hanya sekali serta nelayan dijadikan sebagai objek.
5.	Operasional Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum didasarkan pada perencanaan yang sistimatis, sumberdaya manusia belum dipersiapkan secara baik; • Pemberian bantuan dalam bentuk dana DEP kepada KMP hanya di ketahui oleh ketua kelompok.
6.	Proses Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan hasil penangkapan tidak menggunakan es sementara hasil perikanan bersifat mudah busuk.
7.	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada jaringan pasar yang tersedia sesuai dengan perjanjian.
8.	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dari pemerintah desa maupun kecamatan serta instansi terkait. Pihak LEPP-M3 tidak melaksanakan fungsinya.
9.	Monitoring/Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakan secara teratur.
10.	Pendapatan KMP	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata belum mampu menutupi kredit dari dana DEP.

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Gap inilah yang selama ini mengakibatkan nelayan perikanan tangkap seakan-akan bergantung pada uluran tangan pemerintah yang bahkan cenderung menjadi campur tangan birokrat. Untuk mengatasi gap ini diperlukan personel yang mampu berperan sebagai *komunikator*, *motivator*, *dinamisator*, *korektor* serta *soluter* yang dapat merekatkan kesenjangan antara masyarakat kecil dan pemerintah (Fathoni, 2006).

Mencermati kelembagaan kemitraan melalui program PEMP yang di laksanakan di Kota Ambon, dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, masih terdapat berbagai kelemahan baik dari segi konsep kemitraan yang di bangun maupun implementasinya.

Sementara kondisi masyarakat nelayan di Kota Ambon melalui kelembagaan kemitraan ini diharapkan memberikan solusi bagi melepaskan mereka dari perangkap keterbelakangan yang membelenggu mereka.

Dipahami bahwa peranan utama kelembagaan dalam suatu masyarakat adalah untuk mengurangi ketidaktentuan (*uncertainty*) dengan menetapkan suatu struktur yang stabil bagi interaksi manusia. Stabilitas kelembagaan dapat saja berubah menurut waktu dan proses yang rumit sebagai konsekwensi dari adanya perubahan aturan. Karena kelembagaan dapat berubah, maka berarti secara terus menerus akan terjadi perubahan pilihan yang tersedia bagi manusia dalam masyarakat.



Perkembangan kelembagaan berarti suatu proses menuju kearah perbaikan hubungan antara orang atau kelompok orang dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat membentuk kelembagaan yang dikehendaki. Karena proses tersebut melibatkan unsur norma dan tingkah laku manusia, maka proses tersebut memerlukan waktu.

Dalam prakteknya, pengembangan kelembagaan dicapai melalui program-program yang dirancang dan diimplementasikan dalam suatu proyek, dengan susunan staf, rincian tugas dan tanggung jawab, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, pendanaan dan lain sebagainya. Namun demikian segala sesuatu yang telah dirancang tersebut seyogyanya tidak merupakan suatu rancangan yang kaku (*blueprint*) namun dapat saja berubah sesuai kondisi yang dihadapi di lapangan. Pengembangan kelembagaan memerlukan perencanaan, namun seyogyanya bersifat fleksibel sebagai suatu adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Pendekatan *learning process* mungkin dapat memberikan sumbangan dalam menciptakan kapasitas lokal untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya guna mencapai kelembagaan yang diharapkan (Setiawan, 2003). Dalam konteks ini, ada tiga alternatif dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kelembagaan lokal meliputi *bantuan teknis, fasilitas dan promosi*. Ketiga alternatif tersebut mempersentasikan tingkat keterlibatan (*degree of involvement*) pihak luar yang berbeda-beda terhadap masalah yang berkaitan dengan kelembagaan lokal. Cara yang paling tepat dalam upaya untuk penguatan (*strengthen*) kemampuan kelembagaan lokal yang demokratis sangat tergantung pada (1) kemampuan atas kapasitas yang telah ada sebelumnya, (2) sumber inisiatif perubahan.

Kontribusi kelembagaan kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal diharapkan bahwa nantinya kompetensi ekonomi lokal dapat diidentifikasi dengan baik untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha yang berbasis pada sumberdaya lokal. Hal pokok yang perlu dilakukan adalah pembinaan pemberdayaan kelembagaan lokal, yang diupayakan secara lebih baik melalui proses sosialisasi dalam pembentukan dan keberadaan

kelembagaan kemitraan (Haeruman dan Eryatno, 2001).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi keberhasilan dalam pengembangan kelembagaan lokal adalah:

1. Lembaga kemitraan yang ada atau yang akan dibentuk seyogyanya mampu menampung semua aspirasi dari para pelaku (*stakeholders*). Lembaga ini ditingkat kabupaten atau propinsi akan membahas rumusan dan implementasi kegiatan rencana tindak (*action plan*), serta memobilisasi sumberdaya dan dana kegiatan jaringan kerja usaha dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Lembaga kemitraan ditingkat kabupaten adalah lembaga yang didalamnya melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat, diharapkan dapat lebih mengakses kepada kelompok sasaran yang menjadi induk perekonomian rakyat.
3. Perlu melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat
4. Kelembagaan kemitraan harus menjalankan fungsinya untuk meyerap dan menampung aspirasi kelompok sasaran untuk melakukan tindakan lebih lanjut yang diperlukan baik berupa koordinasi dengan lembaga kemitraan ditingkat kabupaten, maupun dengan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Jaringan kelembagaan (*net working*) perlu dibangun untuk melancarkan mekanisme kerja dan memfasilitas munculnya kemitraan dan arus informasi diantara lembaga-lembaga yang terkait. Dengan demikian upaya pengembangan ekonomi lokal dapat bertumbuh dengan berbasis pada kapasitas lokal dengan mengaitkan pada peluang pasar, baik pada tingkat lokal itu sendiri, regional, nasional maupun internasional. Pengembangan jaringan kelembagaan ini juga akan berkontribusi positif pada peningkatan kapasitas lokal dalam rangka *sinkronisasi* pengelolaan program dan investasi yang ada (baik berupa program pemerintah, bantuan internasional, LSM dll) untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Menyadari kenyataan tersebut, maka pihak pemerintah (dinas kelautan dan perikanan Kota Ambon) yang terwadahi melalui program PEMP semestinya menyadari pola kemitraan

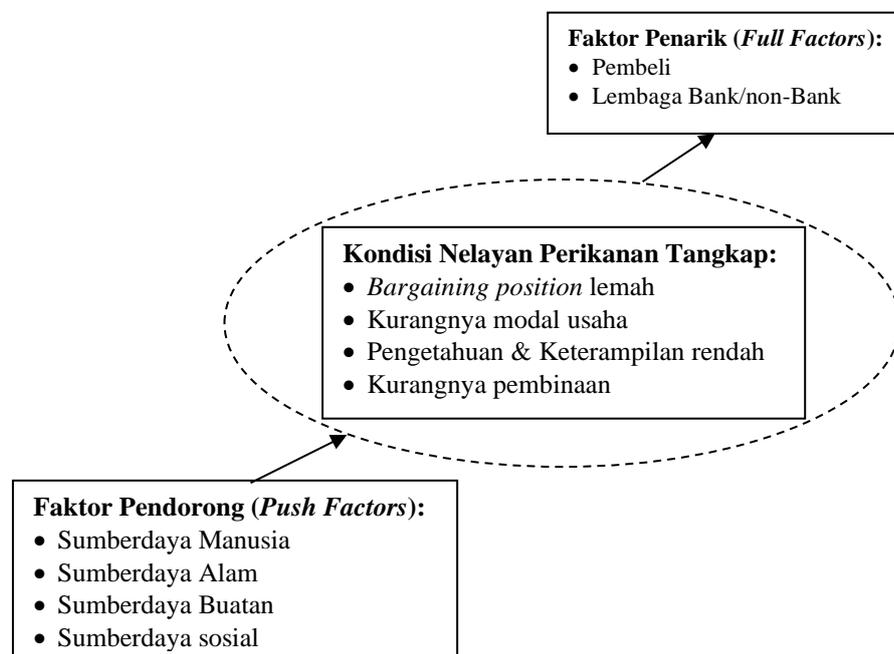


yang diterapkan. Dengan demikian penekanan terhadap aspek bisnis yang diterapkan oleh pihak LEPP-M3 sebagai lembaga bisnis tidak mengabaikan prinsip-prinsip pemberdayaan, sehingga kemitraan yang terbangun akan memberikan keuntungan secara berkeadilan bagi pihak-pihak yang bermitra (Utama, 20025).

Untuk itu adalah merupakan hal yang urgen, bahwa pemahaman terhadap faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*full factor*) mesti menjadi perhatian dalam melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan khususnya nelayan perikanan tangkap. Faktor pendorong dan

penarik dalam pemberdayaan nelayan disajikan pada Gambar 2.

Upaya untuk membangun konsep kemitraan yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat dapat dilakukan dengan terlebih dulu mempelajari tentang potensi masyarakat itu sendiri. Potensi dimaksud berupa potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosialnya, yang dibarengi oleh pemahaman yang tepat tentang masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga kemitraan yang terbangun adalah tepat sasaran, yang pada gilirannya bangunan kemitraan yang dibuat akan dapat memberikan hasil yang baik.



Gambar 2. Faktor Pendorong dan Penarik Dalam Pemberdayaan Nelayan

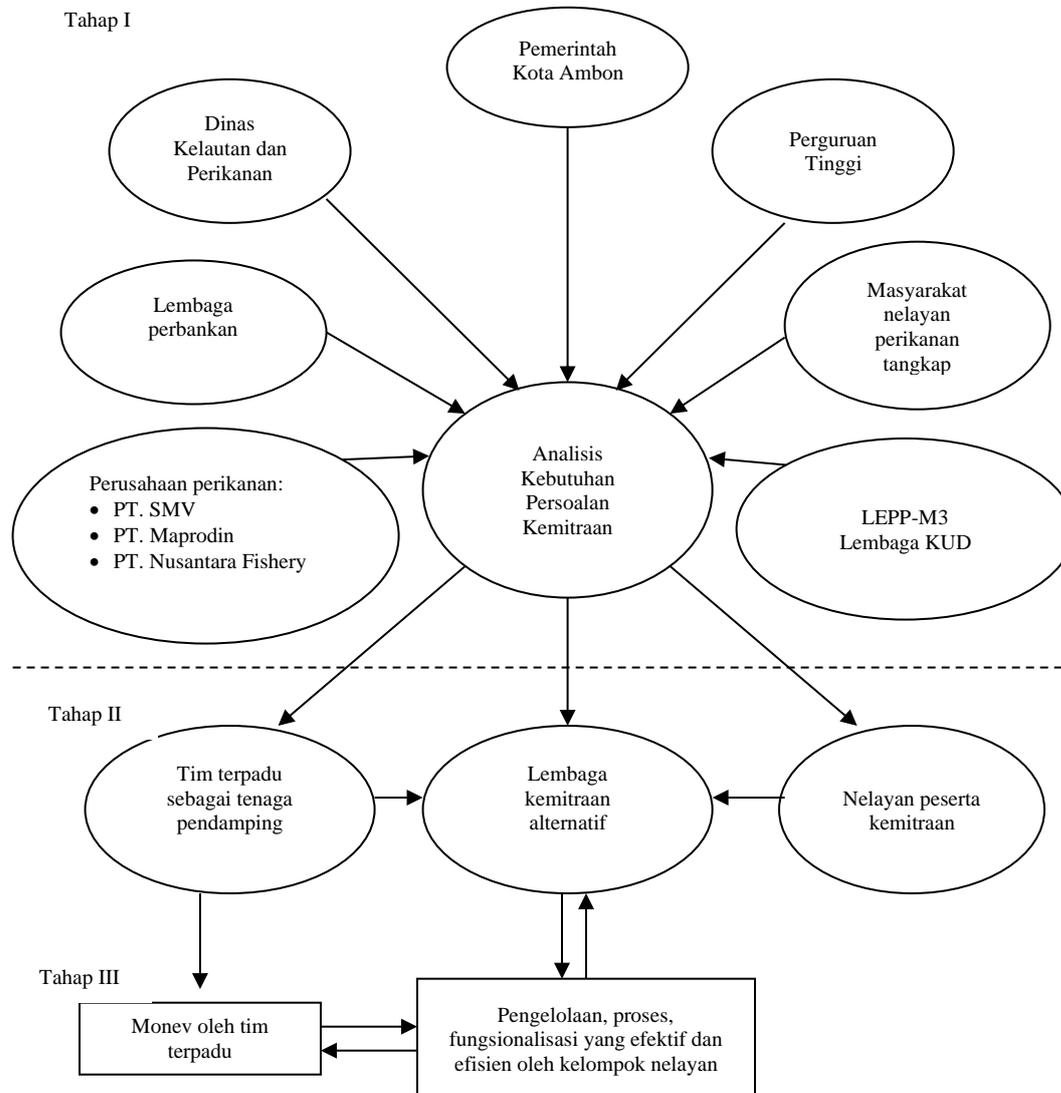
Berdasarkan hasil identifikasi yang disajikan pada Tabel 1 dan 2, maka nampak bahwa pada setiap komponen sumberdaya dan kegiatan kemitraan terdapat beberapa persoalan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Untuk itu upaya mengatasinya perlu didekati secara sistematis dengan melibatkan berbagai potensi sumberdaya yang tersedia. Berkaitan dengan itu maka, pada tahapan ini tidak bermaksud merinci secara detail tentang upaya mengatasi setiap persoalan di atas, tetapi lebih kepada memberikan kerangka kelembagaan kemitraan yang mungkin dapat dilaksanakan secara bersama oleh semua

stakeholders dalam membangun kemitraan usaha ke depan yang lebih baik. Dengan pendekatan tersebut, maka selain dapat melahirkan rencana pembenahan kinerja kemitraan yang realistis, juga dapat menumbuhkan perasaan memiliki dari setiap *stakeholders* yang terlibat di dalamnya.

Usulan yang dikemukakan di sini lebih difokuskan sebagai upaya penciptaan kerangka kemitraan usaha masa depan dengan pola inti plasma. Sebab pola inti plasma memiliki keunggulan yang dapat menjadi pilihan utama bagi pemerintah dalam kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil atau koperasi di bidang

perikanan. Selain itu pada kasus kemitraan yang dibangun oleh LEPP-M3 melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, kinerja kemitraannya masih rendah (Suredjo, 2005). Meskipun secara internal masih terdapat beberapa kelemahan mendasar seperti halnya kelompok masyarakat pemanfaat masih didominasi oleh ketua kelompok dan tidak

menyentuh sistem bagi hasil yang timpang, namun dalam konteks kemitraan dengan LEPP-M3, sebenarnya dapat menjamin terciptanya hubungan usaha yang lebih berkelanjutan. Kerangka alternatif yang diusulkan pada prinsipnya terdiri atas tiga tahapan kegiatan. Secara lebih jelasnya secara skematis ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Alternatif Kelembagaan Dalam Kemitraan

Pada tahap awal, melalui prakarsa pemerintah semua pihak yang terkait dengan kemitraan usaha dilibatkan dalam mengkaji secara bersama tentang persoalan atau kebutuhan semua *stakeholders* dalam upaya pengembangan kelembagaan kemitraan usaha. Dalam kaitan ini yang dikutsertakan sebagai partisipan adalah unsur yang mewakili pemerintah, dinas kelautan dan perikanan

perusahaan/industri yang bergerak di bidang perikanan, masyarakat nelayan (kelompok nelayan dan tengkulak), KUD, LEPP-M3, LSM, Perguruan Tinggi. Agar tahapan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka implementasinya harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan menempatkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Dalam indentifikasi kebutuhan tersebut, perlu ditindak



lanjuti dengan penyusunan agenda aksi dan pembentukan tim terpadu guna memfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antar nelayan dengan pihak pemodal dalam hal ini tengkulak atau bisa juga industri perikanan. Dengan demikian bentuk bantuan dan pembinaan serta aturan main lainnya terdesain berdasarkan aspirasi semua partisipan. Hal ini dimaksudkan agar apapun yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha harus tunduk pada nilai-nilai yang disepakati bersama dan tidak ada satu pihak merasa lebih kuat terhadap pihak lainnya.

Tahapan kedua, tim terpadu membentuk lembaga kemitraan yang di dalamnya terdiri atas kelompok masyarakat nelayan, industri/perusahaan perikanan atau tengkulak yang berfungsi sebagai pemodal. Bila ada bantuan dari instansi pemerintah dalam hal ini pihak dinas kelautan dan perikanan kepada masyarakat nelayan, maka pengelolaannya sebaiknya diserahkan terlebih dahulu kepada beberapa industri perikanan atau tengkulak yang telah berpengalaman dalam mengelola usaha (Dahuri, *et al.*, 2021). Pada masa transisi ini nelayan calon peserta dimagangkan. Uji coba ini selain mentransfer ketrampilan mengelola kepada nelayan calon peserta kemitraan, juga dimaksudkan untuk mengevaluasi berbagai kelemahan dan upaya mengatasinya. Hasil magang ini sekaligus dapat menjadi dasar untuk menentukan nelayan yang pantas ikut dalam program kemitraan. Proses seleksi seperti ini perlu dilakukan agar menghindari perekrutan nelayan yang hanya sekedar memanfaatkan kesempatan, untuk memperoleh bantuan, yang pada gilirannya dapat merusak kinerja kemitraan yang dibangun.

Apabila nelayan calon peserta kemitraan dipandang mampu oleh tim terpadu, maka pengelolaan bantuan segera dialihkan kepada kelompok nelayan. Penentuan industri perikanan atau tengkulak sebagai inti sebaiknya berdasarkan hasil evaluasi kinerjanya pada masa uji coba berlangsung, dengan tetap mengakomodir dan memperhatikan aspirasi nelayan. Untuk menjamin agar kemitraan usaha berlangsung sesuai dengan keinginan atau aspirasi semua *stakeholders*, dan nelayan benar-benar mampu mengelola fasilitas bantuan yang diberikan, kehadiran tim terpadu

sebagai fasilitator untuk jangka waktu tertentu tetap diperlukan. Melalui kerja tim terpadu tersebut, nelayan difasilitasi untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri melalui penguatan wadah kelompok dan koperasi.

Agar kerangka alternatif peningkatan kinerja kemitraan ini sejalan dengan upaya pelestarian sumberdaya perikanan, maka di antara nelayan dan industri perikanan perlu diatur secara tegas tentang wilayah penangkapan masing-masing. Di samping itu, industri perikanan memberlakukan aturan bahwa tidak akan menerima hasil tangkapan nelayan bila cara perolehannya dilakukan dengan cara *destruktif*, begitu pula yang dijual pada pasar lokal, dinas kelautan dan perikanan dapat melakukan penyitaan. Hal ini tentunya tidak mudah untuk segera dipatuhi oleh kedua belah pihak, tetapi dengan otoritas yang dimiliki, pemerintah daerah seyogyanya mendesain mekanisme pemaksaan dalam bentuk *insentif/disinsentif* tertentu terutama bagi industri perikanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kelembagaan kemitraan yang dibangun harus mengakomodir semua kebutuhan *stakeholders* yang terlibat di dalamnya, dengan demikian analisis terhadap kebutuhan kemitraan tersebut oleh tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah Kota Ambon, perlu dilakukan dengan prinsip pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, dan metode yang digunakan lebih bersifat partisipatif. Hal ini dimungkinkan sehingga nelayan yang akan terlibat dalam kemitraan telah dipersiapkan secara baik. Hal ini akan berimplikasi terhadap proses kemitraan tersebut yang pada gilirannya kemitraan yang terbangun akan *sustain*.

Saran

Disarankan bangunan kemitraan yang dibentuk sebaiknya berpolakan kemitraan informal yang telah terlembaga dalam masyarakat, tentu dengan rekonstruksi pola hubungan yang terjadi. Fungsi pengawasan, keterlibatan semua pihak pada semua tahapan, pelatihan manajemen usaha, teknis penangkapan, pembinaan serta penyediaan



pasar perlu dilakukan oleh LEPP-M3 kepada KMP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (1992). Perubahan Struktural Ekonomi dan Arah Pembangunan Sektor Pertanian di Masa Depan. Makalah pada Seminar Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Ditjen Pertanian Tanaman Pangan 18 Agustus 1992. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2008). Kota Ambon Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Ambon, Ambon.
- Dahuri, R, Rais, J., Ginting, S. P., Sitepu, M. J. (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradya Paramita.
- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan. (2008a). Evaluasi Program PEMP di Kota Ambon 2007. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Ambon.
- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan. (2008b). Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Ambon.
- Fathoni, A. (2006). *Organisasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Aneka Cipta. hlm.14-23
- Haeruman, H., & Eryatno. (2001). *Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC Indonesia. hlm. 79-101.
- Kusnadi, M. A. (2002). *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Jember: LkiS Yogyakarta. hlm.80-82
- Setiawan, I. G. D. (2003). *Kelompok, Organisasi & Kepemimpinan : Suatu Kumpulan Perkuliahan Ppn 617*. Bogor: Tirta Kencana Bogor. hlm. 65-67
- Suredjo, S. (2005). Pengembangan Masyarakat Pesisir: Tantangan dan Peluang. Di dalam: Aziz MA, Suhartini R, Halim, editor. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LkiS Yogyakarta). hlm.133-141.
- Utama, A. C. (2005). *LSM vs LAZ. Bermitra atau Berkompetisi. Mencari Model Kemitraan bagi Optimalisasi Potensi Filantropi Menuju Keadilan Sosial*. Jakarta: Piramedia. hlm 45-67.

